

Bagaimana Inggris dan PBB Menyerah pada Terorisme

Pembentukan Israel sebagai negara berdaulat dan penerimaannya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1949 menandai titik balik dalam sejarah abad ke-20, didorong oleh campuran diplomasi, geopolitik, dan kekerasan yang tidak stabil. Inti dari proses ini adalah tindakan kelompok-kelompok ekstremis Zionis, khususnya Irgun dan Lehi, yang tindakan kekerasan ekstremnya—kini diklasifikasikan sebagai terorisme menurut standar modern—memainkan peran penting dalam menekan Inggris untuk melepaskan Mandat Palestina dan memaksa PBB untuk mengakui Israel. Artikel ini berpendapat bahwa Inggris dan PBB, yang kewalahan oleh kampanye kekerasan ini, secara efektif menyerah pada terorisme Zionis, menerima status kenegaraan Israel meskipun kepatuhannya yang parsial terhadap syarat-syarat PBB, termasuk rencana pembagian, hak pengungsi, dan kewajiban hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji komitmen Mandat Inggris untuk melindungi hak-hak Palestina, taktik kelompok Zionis untuk mengakhiri kekuasaan Inggris, syarat-syarat pengakuan PBB terhadap Israel, dan ketidakpatuhan serta pelanggaran hak asasi manusia yang menyertai ekspansi teritorial Israel.

Mandat Inggris dan Kewajibannya terhadap Palestina

Mandat Inggris untuk Palestina, yang diformalkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922, adalah kerangka hukum yang bertugas mengelola wilayah bekas Ottoman sambil mempersiapkannya untuk pemerintahan sendiri. Mandat ini menggabungkan Deklarasi Balfour 1917, yang mengikat Inggris untuk memfasilitasi “pembentukan di Palestina sebuah rumah nasional untuk rakyat Yahudi” sambil memastikan bahwa “tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak sipil dan keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada.” Dengan populasi Palestina sekitar 90% Arab (Muslim dan Kristen) dan 10% Yahudi pada awal 1920-an, melindungi hak-hak Palestina adalah kewajiban inti.

Ketentuan utama Mandat untuk Palestina mencakup perlindungan hak sipil dan keagamaan mereka, memastikan imigrasi Yahudi tidak merugikan posisi mereka, menjamin penghormatan terhadap institusi keagamaan mereka, dan memastikan kebebasan hati nurani, ibadah, dan pendidikan tanpa diskriminasi. Inggris diwajibkan melapor setiap tahun kepada Liga Bangsa-Bangsa untuk memastikan akuntabilitas. Namun, tujuan ganda Mandat—mendukung rumah nasional Yahudi sambil melindungi hak-hak Palestina—terbukti tidak dapat didamaikan. Imigrasi Yahudi melonjak dari 60.000 pada tahun 1917 menjadi 600.000 pada tahun 1947, dan pembelian tanah memicu ketakutan Arab akan penggusuran. Upaya Inggris untuk menciptakan pemerintahan bersama, seperti dewan legislatif, gagal karena boikot Arab dan kekhawatiran Yahudi tentang status minoritas, yang meningkatkan ketegangan.

Kekerasan Ekstremis Zionis: Kampanye Terorisme

Organisasi-organisasi Zionis, yang didorong oleh tujuan negara Yahudi, menjadi militan pada 1940-an, terutama setelah White Paper 1939 membatasi imigrasi Yahudi pada 75.000 selama lima tahun dan membayangkan negara Palestina yang bersatu. Irgun, yang dipimpin oleh Menachem Begin, dan Lehi, yang dikenal sebagai Stern Gang, mengadopsi kekerasan ekstrem untuk membuat kekuasaan Inggris tidak dapat dipertahankan, menargetkan sasaran militer, sipil, dan diplomatik dalam tindakan yang memenuhi definisi terorisme modern. Tujuan mereka adalah "Israel Raya" yang mencakup seluruh Palestina di bawah Mandat, termasuk Tepi Barat dan Transyordania, menolak kompromi seperti rencana pembagian PBB.

Tindakan Kekerasan Utama

1. Sasaran Militer:

- Pada Februari 1946, Irgun dan Lehi menghancurkan 15 pesawat dan merusak delapan di lapangan udara Inggris, melemahkan kontrol militer.
- Pada Juli 1947, Irgun menculik dan menggantung Sersan Inggris Clifford Martin dan Mervyn Paice sebagai pembalasan atas anggota yang dieksekusi, mengejutkan opini publik Inggris dan menyoroti brutalitas konflik.

2. Infrastruktur Sipil:

- Pada Juni 1946, Haganah, Irgun, dan Lehi menghancurkan sembilan dari sebelas jembatan yang menghubungkan Palestina dengan negara-negara tetangga, mengisolasi wilayah tersebut dan mengganggu logistik Inggris.
- Pada Juli 1946, Irgun membom Hotel King David di Yerusalem, markas administrasi Inggris, menewaskan 91 orang (41 Arab, 28 Inggris, 17 Yahudi), yang sangat melemahkan pemerintahan.

3. Serangan terhadap Warga Sipil:

- Irgun membom pasar Arab di Haifa dan Yerusalem, menewaskan puluhan orang dan meningkatkan ketegangan komunal, menciptakan ketakutan yang meluas.
- Pada April 1948, Irgun dan Lehi membantai lebih dari 100 penduduk desa Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, di Deir Yassin, memicu pelarian massal Palestina dan memperburuk krisis pengungsi.

4. Serangan terhadap Properti Inggris di Luar Negeri:

- Pada Oktober 1946, Irgun membom Kedutaan Inggris di Roma dengan 40 kilo TNT, melukai dua orang dan merusak bangunan, dengan Ze'ev Epstein, rekan Begin, di antara pelakunya.
- Pada Agustus 1947, Irgun meledakkan bom koper di markas Inggris di Hotel Sacher Wina, menyebabkan kerusakan ringan namun memperkuat dampak propaganda.

5. Pembunuhan Pejabat Tinggi:

- Pada November 1944, Lehi membunuh Lord Moyne, Menteri Inggris untuk Timur Tengah, di Kairo, menandakan pembangkangan terhadap otoritas Inggris.

- Pada September 1948, Lehi membunuh mediator PBB Folke Bernadotte di Yerusalem, menentang rencana pembagian revisinya yang mengurangi wilayah Yahudi dan menekankan kembalinya pengungsi.

Taktik Tambahan

- **Imigrasi Ilegal (Aliyah Bet):** Badan Yahudi, dengan dukungan Irgun dan Lehi, mengorganisir imigrasi ilegal, membawa puluhan ribu pengungsi Yahudi ke Palestina. Insiden SS Exodus pada Juli 1947, di mana Inggris secara paksa mengembalikan 4.515 pengungsi ke Eropa, menjadi kemenangan propaganda yang merusak reputasi Inggris.
- **Kampanye Propaganda:** Kelompok Zionis menggambarkan kebijakan Inggris sebagai antisemit, memanfaatkan simpati terhadap Holocaust, terutama di AS, untuk menekan hubungan Anglo-Amerika.
- **Dukungan Keuangan:** United Jewish Appeal mengumpulkan \$150 juta pada tahun 1947, setengahnya untuk Palestina, mendanai upaya perlawanan.

Tindakan-tindakan ini menciptakan lingkungan yang tidak dapat diatasi, dengan kerusakan ekonomi diperkirakan mencapai £2 juta dan ratusan korban Inggris, yang membuat Inggris yang lelah perang kewalahan.

Penyerahan Inggris: Menyerah pada Terorisme

Keputusan Inggris untuk melepaskan Mandat, diumumkan pada Februari 1947 dan diselesaikan pada 14 Mei 1948, didorong oleh tekanan tak henti-hentinya dari kekerasan Zionis dan kendala yang lebih luas. Pasca-Perang Dunia II, Inggris menghadapi utang £3 miliar dan bergantung pada pinjaman AS. Mempertahankan 100.000 pasukan di Palestina, yang menelan biaya jutaan setiap tahun, tidak berkelanjutan di tengah tuntutan domestik untuk rekonstruksi. Opini publik Inggris, yang lelah karena perang dan korban, berbalik melawan Mandat, dengan media menggambarkan Palestina sebagai rawa-rawa. Tekanan AS untuk menerima 100.000 pengungsi Yahudi dan dukungan Soviet untuk pembagian semakin melemahkan posisi Inggris.

Kekerasan oleh Irgun dan Lehi, terutama insiden profil tinggi seperti pemboman Hotel King David dan Urusan Sersan, melemahkan semangat pasukan Inggris dan mengikis kehendak politik. Tindakan teroris ini, dengan menciptakan kekacauan dan ketakutan, secara langsung berkontribusi pada ketidakmampuan Inggris untuk memerintah. Dengan merujuk masalah ini ke PBB, Inggris mengakui bahwa mereka tidak dapat mengelola kekerasan atau mendamaikan kewajiban Mandat yang kontradiktif, secara efektif menyerah pada ekstremisme Zionis sambil gagal menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak Palestina.

Pengakuan dan Keanggotaan PBB: Syarat dan Kapitulasi

PBB, sebagai penerus Liga Bangsa-Bangsa, mewarisi masalah Palestina pada tahun 1947. Tanggapannya membentuk kenegaraan dan keanggotaan Israel, tetapi proses ini sangat

dipengaruhi oleh konteks kekerasan yang diciptakan oleh kelompok Zionis.

Rencana Pembagian PBB dan Kenegaraan Israel

Pada November 1947, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 181, yang mengusulkan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi (56%) dan Arab (43%), dengan Yerusalem diinternasionalkan. Badan Yahudi menerima rencana tersebut, melihatnya sebagai jalan menuju kenegaraan, sementara pemimpin Arab menolaknya, menentang negara Yahudi apa pun. Pada 14 Mei 1948, saat Mandat berakhir, Israel memproklamasikan kemerdekaan, mengutip Resolusi 181. Perang Arab-Israel yang berikutnya memperluas wilayah Israel menjadi 78% dari Palestina di bawah Mandat melalui Perjanjian Gencatan Senjata 1949, melampaui alokasi PBB.

Syarat untuk Keanggotaan PBB

Israel mencapai keanggotaan PBB pada 11 Mei 1949 melalui Resolusi 273 (III), dengan 37 suara mendukung, 12 menentang (kebanyakan negara Arab), dan 9 abstain. Penerimaan ini bergantung pada:

- **Kepatuhan terhadap Piagam PBB:** Israel berjanji untuk menjunjung prinsip-prinsip Piagam, termasuk penyelesaian sengketa secara damai dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- **Resolusi 181 (Rencana Pembagian):** Deklarasi Israel dan pernyataan PBB menegaskan penerimaan rencana pembagian, meskipun perbatasan yang diperluas diterima secara diam-diam sebagai realitas perang.
- **Resolusi 194 (Hak Pengungsi):** Pasal 11 menyerukan pengungsi Palestina untuk kembali atau menerima kompensasi. Israel menyatakan kesediaan untuk bernegosiasi tetapi menolak pemulangan skala besar karena alasan keamanan dan demografi.
- **Kewajiban Hak Asasi Manusia:** Israel diharapkan mematuhi norma-norma hak asasi manusia yang sedang berkembang, termasuk non-diskriminasi dan hak minoritas.

Keputusan PBB dipengaruhi oleh:

- **Kekerasan Zionis:** Pembunuhan mediator PBB Folke Bernadotte oleh Lehi pada tahun 1948, yang menentang rencana pembagian revisinya, menegaskan penolakan radikal terhadap kompromi. Meskipun pemerintah Israel mengutuk tindakan tersebut, itu menyoroti konteks yang tidak stabil.
- **Dukungan Geopolitik:** AS dan Uni Soviet mendukung penerimaan Israel untuk melawan pengaruh satu sama lain dan mengatasi kekhawatiran kemanusiaan pasca-Holocaust.
- **Pragmatisme:** PBB mengakui kontrol de facto Israel atas wilayah yang diperluas, memprioritaskan stabilitas daripada penegakan ketat perbatasan Resolusi 181.

Dengan menerima Israel, PBB menyerah pada realitas yang dibentuk oleh terorisme Zionis, yang telah memaksa keluarnya Inggris dan menciptakan fait accompli melalui

keuntungan militer. Syarat-syarat, meskipun diterima secara formal oleh Israel, ditegakkan secara longgar, memungkinkan Israel untuk menghindari kepatuhan penuh.

Ketidakpatuhan Israel dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Keanggotaan PBB Israel didasarkan pada komitmen terhadap resolusi PBB dan hak asasi manusia, tetapi tindakannya menunjukkan ketidakpatuhan yang signifikan, disertai dengan ekspansi teritorial dan pelanggaran hak asasi manusia.

Ketidakpatuhan terhadap Syarat PBB

1. Resolusi 181 (Rencana Pembagian):

- Perbatasan Israel pada tahun 1949 mencakup 78% dari Palestina di bawah Mandat, jauh melebihi 56% yang dialokasikan oleh Resolusi 181. Wilayah seperti Galilea barat dan bagian dari Negev diinkorporasikan melalui penaklukan, tanpa negara Arab yang didirikan.
- Kegagalan untuk mengimplementasikan rencana pembagian secara penuh memicu keluhan Arab dan melemahkan kerangka PBB.

2. Resolusi 194 (Hak Pengungsi):

- Israel memblokir kembalinya sekitar 700.000 pengungsi Palestina yang terusir pada tahun 1948, meskipun Resolusi 194 menyerukan repatriasi atau kompensasi. Undang-Undang Properti Absen 1950 mentransfer tanah pengungsi ke kepemilikan Yahudi, memprioritaskan kontrol demografis.
- Krisis pengungsi menjadi landasan konflik Arab-Israel, dengan jutaan orang tetap tak bernegara di kamp-kamp di Yordania, Lebanon, dan Suriah.

3. Piagam PBB dan Hak Asasi Manusia:

- Pemerintahan militer Israel atas minoritas Arabnya (1948–1966) membatasi kebebasan sipil, termasuk pergerakan dan ekspresi politik, melanggar prinsip non-diskriminasi. Undang-undang tanah yang diskriminatif dan alokasi sumber daya yang tidak setara memarginalisasi warga Palestina.
- Praktik-praktik ini menanamkan ketidaksetaraan sistemik, bertentangan dengan komitmen hak asasi manusia Piagam PBB.

Ekspansi Teritorial

Ambisi Israel melampaui garis gencatan senjata 1949:

- Pada tahun 1956, Israel menduduki Semenanjung Sinai selama Krisis Suez, menarik diri di bawah tekanan PBB tetapi menunjukkan kecenderungan ekspansionis.
- Dalam Perang Enam Hari 1967, Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan, menduduki 22% sisanya dari Palestina di bawah Mandat. Aneksasi Yerusalem Timur dan ekspansi pemukiman melanggar hukum internasional, termasuk larangan Konvensi Jenewa Keempat terhadap transfer pemukim ke tanah yang diduduki.

- Pada tahun 2025, lebih dari 700.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, didukung oleh kebijakan negara, yang memperkuat pendudukan dan menggusur warga Palestina.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tindakan Israel di wilayah yang diduduki merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi:

- **Penggusuran dan Penghancuran Rumah:** Ribuan rumah Palestina telah dihancurkan untuk ekspansi pemukiman atau alasan hukuman, melanggar hak atas perumahan dan properti.
- **Pembatasan Pergerakan:** Pos pemeriksaan, penghalang Tepi Barat, dan blokade Gaza membatasi mobilitas Palestina, memengaruhi akses ke pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan, melanggar kebebasan bergerak.
- **Penggunaan Kekuatan Berlebihan dan Penahanan:** Operasi militer dan penahanan administratif, sering tanpa pengadilan, menyebabkan kematian warga sipil dan penahanan sewenang-wenang, melanggar proses hukum dan hak untuk hidup.
- **Diskriminasi Sistematis:** Laporan menggambarkan kebijakan Israel sebagai apartheid, mengutip segregasi, hak yang tidak setara, dan diskriminasi sistematis terhadap warga Palestina di Israel dan wilayah yang diduduki.

Pelanggaran ini, yang didorong oleh prioritas Israel terhadap kontrol teritorial dan dominasi demografis Yahudi, sangat kontras dengan syarat PBB untuk keanggotaannya, terutama kewajiban hak asasi manusia dan pengungsi.

Kesimpulan

Kelompok ekstremis Zionis seperti Irgun dan Lehi, melalui tindakan teroris—menargetkan lapangan udara militer, infrastruktur sipil, populasi Arab, properti Inggris di luar negeri, dan membunuh pejabat seperti Moyne dan Bernadotte—memaksa Inggris untuk melepaskan Mandat untuk Palestina. Tindakan ini, yang memanfaatkan kelemahan Inggris pasca-perang, membuat pemerintahan tidak memungkinkan, yang mengarah pada keterlibatan PBB. PBB mengusulkan rencana pembagian 1947 dan menerima Israel sebagai anggota pada tahun 1949, dengan syarat mematuhi Piagam PBB, hak asasi manusia, Resolusi 181, dan hak pengungsi. Dengan menerima kenegaraan Israel meskipun perbatasan yang diperluas dan kepatuhan yang terbatas, Inggris dan PBB menyerah pada realitas yang dibentuk oleh terorisme Zionis. Ketidakpatuhan Israel selanjutnya—mempertahankan wilayah di luar rencana pembagian, memblokir kembalinya pengungsi, dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia melalui pendudukan dan pemukiman—melemahkan komitmen PBB-nya, memperpanjang konflik Palestina dan meninggalkan hak-hak Palestina tidak terpenuhi.